

## IMPLEMENTASI TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PENGELOLA PASAR DI PASAR ADARO PARINGIN KABUPATEN BALANGAN

Wildan Kurniawan<sup>1</sup>, Siti Raudah<sup>2</sup>, Arif Budiman<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Email: [kurniawanwildan082@gmail.com](mailto:kurniawanwildan082@gmail.com)

### ABSTRAK

UPTD Pengelola Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar meliputi: penataan dan pengaturan, penertiban dan pengamanan, pengawasan kebersihan pasar, pemungutan dan pemasukan retribusi pasar, dan sewa toko/kios pada pasar. Kurangnya pengawasan dan penindakan pada pedagang, kebersihan dan kerapian pasar yang kotor, Kurangnya prasana seperti lahan parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pasar Di Pasar Adaro Paringin Kabupaten Balangan, untuk Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pasar Di Pasar Adaro Paringin Kabupaten Balangan. Metode penelitian yaitu deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data melalui penarikan sampel secara *purposive sampling* berjumlah 12 orang. Dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Implementasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pasar Di Pasar Adaro Paringin Kabupaten Balangan cukup baik. Melingkupi indikator transmisi, kejelasan, staf, finansial, wewenang, fasilitas, pengangkatan birokrasi, dan efek disposisi. Aspek yang belum baik yaitu konsistensi, SOP, dan fragmentasi. faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu kurangnya prasarana, keterlambatan tata kerja. Disarankan Kepala UPTD Pengelola Pasar tegas dalam pengelolaan tata kerja. Dan pegawai UPTD Pengelola Pasar Adaro Paringin hendaknya lebih giat atau konsisten. Kata kunci: Implementasi, Tata Kerja.

### ABSTRACT

*The Market Management UPTD has the main task of implementing technical services to the community of market service/area users including: arrangement and regulation, order and security, supervision of market cleanliness, collection and income of market levies, and shop/kiosk rentals in the market. Lack of supervision and action against traders, cleanliness and tidiness of dirty markets, lack of infrastructure such as parking lots. This study aims to determine the Implementation of the Work Procedures of the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) Market Management in Adaro Paringin Market, Balangan Regency, to determine the factors that influence the Implementation of the Work Procedures of the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) Market Management in Adaro Paringin Market, Balangan Regency. The research method is descriptive-qualitative. Data collection techniques are interviews, observations and documentation. Data sources through purposive sampling totaling 12 people. Analyzed using data reduction techniques, data presentation, and verification or drawing conclusions. The Implementation of the Work Procedures of the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) Market Management in Adaro Paringin Market, Balangan Regency is quite good. Covering indicators of transmission, clarity, staff, finance, authority, facilities, bureaucratic appointments, and disposition effects. Aspects that are not good are consistency, SOP, and fragmentation. Factors that influence it are lack of infrastructure, delays in work procedures. It is recommended that the Head of the Market Management UPTD be firm in managing work procedures. And employees of the Adaro Paringin Market Management UPTD should be more active or consistent. Keywords: Implementation, Work Procedures*

## PENDAHULUAN

Pasar adalah tempat di mana orang-orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan keinginan untuk membelanjakannya bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Oleh karena itu, dalam pengertian ini, pasar digerakkan oleh beberapa komponen, termasuk keinginan, daya beli, dan tindakan pembelian, yang menghasilkan permintaan dan penawaran dalam sebuah transaksi.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan adalah ketidaksesuaian antara rencana kebijakan dan keadaan di lapangan, kekurangan sumber daya dan dukungan, perbedaan pemahaman antara pihak-pihak terkait, dan resistensi pihak yang terkena dampak terhadap perubahan. Selain itu, perubahan sosial, ekonomi, dan politik juga dapat berdampak besar pada pelaksanaan kebijakan.

Dalam industri saat ini, penelitian tentang pelaksanaan kebijakan sangat penting, terutama dalam konteks pemerintahan, organisasi non-profit, dan sektor swasta. Pemangku kepentingan dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan memahami lebih baik tentang apa yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Selain itu, hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan.

Peraturan adalah aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah lokal atau daerah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan di wilayah tersebut. Peraturan ini biasanya mencakup bidang seperti tata ruang, lingkungan, pendidikan, kesehatan, transportasi, perizinan usaha, dan masih banyak lagi. Tujuan peraturan daerah adalah untuk memastikan ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan pengembangan wilayah setempat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini dapat berbeda tergantung pada situasi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.

Salah satu lembaga pemerintah adalah UPTD Pengelola Pasar Kabupaten Balangan. Sebagai lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan pasar dan bertanggung jawab untuk melayani kepentingan umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan membutuhkan kinerja yang cepat, tepat, dan akurat.

UPTD Pengelola Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar yang meliputi:

1. penataan dan pengaturan;
2. penertiban dan pengamanan;
3. pengawasan kebersihan pasar;
4. pemungutan dan pemasukan retribusi pasar; dan
5. sewa toko/kios pada pasar.

Data karyawan UPTD Pengelola Pasar terdiri dari 5 (lima) pegawai negeri sipil, mulai dari kepala UPTD Pengelola Pasar, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, hingga pramu bakti. Dan 19 orang tenaga honorer bekerja di pasar Adaro Paringin sebagai pengawas pasar, pengawas pemeliharaan dan prasarana pasar, dan petugas penarik retribusi.

Selain itu, banyaknya pedagang di pasar Adaro Paringin menjual berbagai jenis barang dagangan, seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.1 berikut.



**Tabel 3.1**  
**Data Pedagang Pasar Adaro Paringin**

NO	Jenis Pedagang	Jumlah
1	Kelontongan	6
2	Sembako	20
3	Beras	4
4	Pencarikiran	3
5	Pakaian	8
6	Ponsel	4
7	Elektronik	3
8	Tas/sepatu	3
9	Kosmetik	3
11	Pedagang sayur	12
12	Pedagang ikan	22
13	Pedagang daging	3
14	Pedagang ayam	5
	Total	96

*Sumber data : UPTD Pengelola Pasar 2024*

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan peneliti pada UPTD Pengelolaan Pasar di pasar Adaro Paringin diketahui bahwa:

1. Kurangnya pengawasan dan penindakan pada pedagang yang berjualan pada pinggir jalan maupun trotoar pasar menyebabkan lambatnya arus lalu lintas bahkan bisa menyebabkan macet ini tidak sesuai dengan pasal 4 ayat b dan c pada Peraturan Bupati Balangan Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar. *(berdasarkan data observasi)*
2. Tentang kebersihan dan kerapian pasar yang tidak rapi dan kotor seperti kursi atau meja pedagang yang tidak disusun dengan baik menyebabkan kerapian pasar kurang dibersihkan pedagang ini tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat a dan c pada Peraturan Bupati Balangan Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar. *(berdasarkan data observasi)*

Kurangnya prasana seperti lahan parkir menyebabkan kendaraan yang mau parkir jadi tidak bisa maksimal dalam tidak tersusun rapi seperti ini bisa dikeluhkan oleh pembeli karena susah mencari tempat parkir. Ini tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat a pada Peraturan Bupati Balangan Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar *(berdasarkan data wawancara dan observasi)*

## METODE

Penelitian ini dilakukan pada pasar Adaro Paringin Kabupaten Balangan, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif . Tipe Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang menjadi acuan adalah data primer dan sekunder, dan observasi, dokumentasi, dan wawancara adalah metode pengumpulan data. Sumber data diperoleh melalui pengambilan sampel purposive dari dua belas individu. Teknik untuk mengurangi data, menyajikan data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan digunakan. Menggunakan teori implementasi dari George



C. Edward III dalam (Leo Agustino,2017:136-141) yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Untuk Uji Kredibilitas Data menggunakan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisa kasus negatif, dan *membercheck*.

**Tabel 3.2**  
**Sumber Data Informan**

No.	Nama	Jabatan
1.	Nurliana, AMK	Kepala UPTD Pengelola Pasar
2.	Husnawati	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Pasar
3.	Muhamad Arsyad	Pengadministrasi Umum UPTD Pengelola Pasar
4.	Sarkati	Pengadministrasi Keuangan UPTD Pengelola Pasar
5.	Masruni Fran	Pramu Bakti UPTD Pengelola Pasar
6	Supian Tsaurie	Petugas Kebersihan Pasar Adaro Paringin
7	Mujahidinor	Pemeliharaan dan Prasarana Pasar
8	Halimatus Sa'diah	Pemeliharaan dan Prasarana Pasar
9	Nurlina Astuti	Pemeliharaan dan Prasarana Pasar
10	Sumarti	Pemeliharaan dan Prasarana Pasar
11	Fahriah	Pemeliharaan dan Prasarana Pasar
12	Muhammad Abdillah	Pengadministrasi Umum Di Bagian UPTD Pengelola Pasar
	Total	12 Orang

## PEMBAHASAN

Ada sebelas komponen yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, menurut teori George C. Edward III tentang proses implementasi (Leo Agustino, 2017:136-141), di antaranya :

### 1. Komunikasi

#### a. Transmisi

Dalam penyampaian kebijakan, transmisi adalah pertukaran data antara orang yang menerima dan orang yang mengirim pesan.

.Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pasar Di Pasar Adaro Paringin Kabupaten Balangan mengenai transmisi sudah baik sudah baik



karena kepala UPTD Pengelola pasar dan stafnya yang menyampaikan sejumlah peraturan mengenai Pengelolaan pasar dengan melaksanakan komunikasi yang baik kepada pegawai dengan beberapa cara yang ada, mulai dari secara langsung maupun tidak langsung, dan dengan cara seperti menggunakan media whatsapp dapat dengan lebih cepat menyampaikan informasi dari kepala UPTD ke seluruh pegawai maupun staf.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III ( Leo Agustino, 2017:136-141) Transmisi : Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan implementasi yang baik pula.

b. Kejelasan

Kejelasan berarti bahwa setiap orang dapat memahami kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pasar Di Pasar Adaro Paringin Kabupaten Balangan mengenai kejelasan sudah baik karena penyampaian informasi oleh Kepala UPTD kepada para Pegawai dan staf serta tujuan dari penyampaian informasi yang jelas itu sudah tertulis di Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2023 yang diperuntukkan kepada pegawai dan mereka paham tentang informasi tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III ( Leo Agustino, 2017:136-141) dalam pendekatan yang disampaikan oleh Edward III, terdapat variable yaitu kejelasan : Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan mudah dipahami.

c. Konsistensi

Konsistensi adalah sifat yang terus menerus dilakukan dengan tekun.

Berdasarkan hasil wawancara, dan observasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pasar Di Pasar Adaro Paringin Kabupaten Balangan mengenai konsisten belum baik karena ada beberapa informasi yang disampaikan oleh Kepala UPTD tidak diterapkan secara konsisten diterapkan hal ini menyebabkan tidak maksimalnya penerapan informasi di lapangan oleh para pegawai atau staf UPTD karena menunggu arahan ataupun hal-hal lainnya.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C.

Edward III (Agustino, 2017:136-141) dalam pendekatan oleh Edward III, terdapat beberapa variabel yaitu konsisten : Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Karena kebijakan bersifat lama jadi harus konsisten.

## 2. Sumber Daya

a. Staf

Staf adalah sumber daya manusia yang menjadi penyelenggara kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pasar Di Pasar Adaro Paringin Kabupaten Balangan mengenai staf sudah baik karena pegawai ataupun staf di UPTD Pengelola Pasar Adaro Paringin dalam menjalankan tugas mereka berdasarkan struktur organisasi, SK (surat keputusan) Dinas terkait, dan dari Peraturan Bupati terlampir

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Leo Agustino 2017:136-141) dalam pendekatan yang disampaikan oleh Edward III, terdapat beberapa variabel yaitu staf : Kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan sering disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, tidak memadai, atau tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan personel dan implementator saja tidak cukup, tetapi diperlukan kecukupan



staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan kebijakan itu sendiri.

b. Finansial

Finansial merupakan keuangan yang membantu dalam mensukseskan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pasar Di Pasar Adaro Paringin Kabupaten Balangan mengenai finansial sudah baik karena sumber daya finansial atau keuangan UPTD tersebut dikelola oleh Kepala, Kasubbag TU, dan Pengadministrasi Keuangan UPTD Pengelola Pasar, namun untuk transparansi pengelolaan dana ataupun keuangan pada UPTD tidak tertulis anggaran dalam laporan tertulis.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Leo Agustino, 2017:136-141) dalam pendekatan yang disampaikan oleh Edward III,

c. Wewenang

Wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Wewenang merupakan sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pasar Di Pasar Adaro Paringin Kabupaten Balangan mengenai wewenang atau kekuasaan cukup baik dilihat dari kebijakan ini diberikan oleh dinas Perdagangan dan Perindustrian kepada para UPTD Pengelola Pasar dan diamanahi untuk meningkatkan, pembinaan, pemeliharaan, pengawasan, perawatan pada Pasar Adaro Paringin sesuai arahan dan peraturan yang berlaku untuk koordinasi keamanan, koordinasi penagihan dan tata laksana pasar sehingga pengelolaan berjalan dengan baik.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Leo Agustino, 2017:136-141) dalam pendekatan yang disampaikan oleh Edward III terdapat beberapa variabel yaitu wewenang : Wewenang berpengaruh dalam implementasi suatu kebijakan. Jika wewenang yang dimiliki oleh staf dipergunakan dengan baik dan benar, maka wewenang akan menyebabkan saja implementasinya berjalan dengan timpang.

d. Fasilitas

Fasilitas adalah segala sesuatu yang berupa benda maupun uang yang dapat menunjang suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pasar Di Pasar Adaro Paringin Kabupaten Balangan mengenai fasilitas belum baik, karena walau kondisi prasarana dalam keadaan baik namun ada beberapa prasarana yang kurang dan ada juga yang perlu ditingkatkan atau ditambah seperti printer, bangunan penunjang, dan lahan parkir serta pengelolaannya agar lebih bagus dalam penataan pas.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Leo Agustino, 2017:136-141) dalam pendekatan yang disampaikan oleh Edward

III terdapat beberapa variabel yaitu fasilitas : Fasilitas fisik akan sangat menunjang dalam

implementasi suatu kebijakan. Jika staf yang dimiliki telah mencukupi dan memadai serta mengetahui apa yang harus dikerjakannya, wewenang yang diberikan juga telah terlegitimasi, sementara fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) tidak tersedia, tentu saja implementasinya berjalan dengan timpang.



### 3. Disposisi

#### a. Pengangkatan Birokrasi

Birokrasi adalah suatu organisasi yang mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pasar Di Pasar Adaro Paringin Kabupaten Balangan mengenai pengangkatan birokrasi cukup baik, karena pengangkatan birokrasi diserahkan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepada Kepala UPTD Pengelola Pasar sebagai pelaksana pengelolaan pasar dan pengawas jalannya sesuai dengan arahan dari Dinas terkait dengan Surat Perintah Tugas atau SPT.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Leo Agustino, 2017:136-141) Menurut pendekatan Edward III, beberapa faktor, seperti pengangkatan birokrasi, disposisi, dan sikap pelaksana, akan menghambat implementasi kebijakan jika personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan. Oleh karena itu, orang yang dipilih dan diangkat haruslah mereka yang sangat berdedikasi pada kebijakan dan kepentingan warga.

#### b. Efek Disposisi

Jika staf yang ada tidak mengikuti kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi, sikap pelaksana akan menghalangi pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pasar Di Pasar Adaro Paringin Kabupaten Balangan mengenai efek disposisi belum cukup baik, karena komitmen tugas UPTD Pengelola Pasar sebagai pelaksana dan pengawas jalannya pasar tidak sering melakukan penertiban pedagang dan pengawasan di Pasar Adaro Paringin.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Leo Agustino, 2017:136-141) Menurut pendekatan Edward III, beberapa faktor, seperti pengangkatan birokrasi, disposisi, dan sikap pelaksana, akan menghambat implementasi kebijakan jika personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang

diinginkan. Akibatnya, komitmen pelaksana sangat memengaruhi kebijakan yang akan dibuat

### 4. Struktur Birokrasi

#### a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sistem yang harus dipatuhi dalam menjalankan pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan Dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pasar Di Pasar Adaro Paringin Kabupaten Balangan mengenai SOP belum baik karena walaupun pegawai/staf menjalankan tugas sesuai prosedur atau SOP namun tidak adanya untuk SOP atau Prosesur yang tertera menyebabkan tidak bisanya melihat pegawai melakukan tugas

sesuai dengan SOP atau tidak.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Leo Agustino, 2017:136-141) dalam pendekatan yang disampaikan Edward III



terdapat beberapa variabel yaitu SOP, SOP adalah rangkaian-rangkaian pelaksanaan dalam birokrasi. SOP yang baik akan membuat pengelolaan suatu kegiatan akan tertib dan teratur serta runtut dari awal sampai akhir.

b. Fragmentasi

Tujuannya untuk menyebar tanggung- jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program kepada unit kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pasar Di Pasar Adaro Paringin Kabupaten Balangan mengenai Fragmentasi belum cukup baik karena dalam menjalankan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas staf atau pegawai pada UPTD Pengelola Pasar Adaro Paringin masih mendapati kendala maupun kesulitan dengan contoh yang memegang tanggung jawab pada tugasnya tidak hadir atau berkesibukan hal ini menyebabkan tidak adanya penanggung jawab untuk jabatan di waktu tersebut.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III ( Agustino, 2014:149) fragmentasi yakni tak lain adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan birokrat diantara beberapa unit kerja

Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi Implementasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pasar Di Pasar Adaro Paringin Kabupaten Balangan:

1. Faktor Pendukung

a. Koordinasi antar badan pelaksana berjalan dengan baik

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung Implementasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pasar Di Pasar Adaro Paringin Kabupaten Balangan adalah membuat badan bekerja sama dengan baik, seperti UPTD Pengelola Pasar bertanggung jawab terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan.

2. Faktor Penghambat

a. Kurangnya Jumlah Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat Implementasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola

Pasar Di Pasar Adaro Paringin Kabupaten Balangan adalah Karena kurangnya prasarana penunjang terhambat karena kurangnya anggaran.

b. Keterlambatan dalam Tata Kerja

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat Implementasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pasar Di Pasar Adaro Paringin Kabupaten Balangan adalah kurangnya denda atau bahkan sanksi dari pada UPTD Pengelola Pasar terhadap pegawai yang menyebabkan tidak merasa harus menaati himbauan yang berlaku.

## SIMPULAN

Implementasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pasar Di Pasar Adaro Paringin cukup baik terlihat dari indikator: *Pertama*, sub variabel komunikasi diketahui indikator transmisi sudah baik karena kepala UPTD Pengelola pasar dan stafnya yang menyampaikan sejumlah peraturan mengenai Pengelolaan pasar dengan melaksanakan komunikasi yang baik kepada pegawai dengan beberapa cara yang ada, mulai dari secara



langsung maupun tidak langsung, indikator kejelasan sudah baik karena tujuan dari penyampain informasi yang jelas itu diperuntukkan kepada pegawai dan mereka paham tentang informasi tersebut, indikator konsisten belum baik karena ada beberapa informasi yang tidak disampaikan secara konsisten oleh Kepala UPTD menyebabkan kurangnya penerapan informasi di lapangan oleh para pegawai lainnya. *Kedua*, sub variabel sumber daya diketahui indikator

staf sudah baik karena staf di UPTD Pengelola Pasar dalam menjalankan tugas mereka berdasarkan struktur organisasi untuk tugas dan tupoksi masing-masing serta dipertanggung jawabkan, indikator finansial mengenai finansial sudah baik karena sumber daya tentang finansial atau keuangan UPTD tersebut dikelola oleh Kepala, Kasubbag TU, dan Pengadministrasi Keuangan UPTD Pengelola Pasar, indikator wewenang cukup baik dilihat dari kebijakan ini diberikan kepada UPTD Pengelola Pasar untuk koordinasi keamanan, koordinasi penagihan dan tata laksana pasar sehingga berjalan dengan baik, indikator fasilitas cukup baik, yang perlu ditambah seperti bangunan penunjang dan lahan parkir agar lebih bagus dalam penataan pasar. *Ketiga*, sub variabel disposisi di ketahui indikator pengangkatan birokrasi mengenai pengangkatan birokrasi cukup baik, karena pengangkatan birokrasi diserahkan dari Dinas kepada UPTD pasar sebagai pelaksana dan pengawas jalannya pasar berupa surat keputusan, indikator efek disposisi belum cukup baik, karena komitmen tugas UPTD Pengelola Pasar sebagai pelaksana dan pengawas jalannya pasar tidak selalu melakukan tugas lapangan. *Keempat*, sub variabel struktur birokrasi diketahui indikator SOP belum baik karena kegiatan pengelolaan pasar tidak adanya bagan ataupun petunjuk yang tertera walaupun dilakukan beberapa sudah sesuai dengan SOP yang ada.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pasar Di Pasar Adaro Paringin terbagi menjadi dua. *Pertama*, faktor pendukung yaitu: terjalin koordinasi yang baik antar badan terlaksana seperti pertanggung jawaban UPTD Pengelola Pasar terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga memudahkan dalam melaksanakan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pasar. *Kedua*, faktor penghambat meliputi : Karena kurangnya prasarana penunjang terhambat karena kurangnya anggaran. Dan keterlambatan kerja karena kurangnya denda atau bahkan sanksi dari pada UPTD Pengelola Pasar terhadap pegawai yang menyebabkan tidak merasa harus menaati himbauan yang berlaku..

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2021. Peraturan Bupati Balangan (PERBUP) Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar. Balangan.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Hamdi Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, Dan Partisipasi*. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo. Zifatama Publishing.
- Maulana, Delly & Arif Nugroho. 2019. *Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. Banten:AA. Rizky.
- TIM Penyusun STIA, 2022. Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1). Amuntai: STIA